

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)

¹Rika Ratna Puri, ²Sri Fadillah, ³Edi Sukarmanto

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan bisnis

Email: rikaratnapuri94@gmail.com

Abstract. This research aims to determine the effect of Economic Growth, Local Revenue and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the Allocation of Capital Expenditure Budget. In this research, Economic Growth Data and Gross Regional Domestic Product are accessed through the website of the regency BPS concerned. While the Capital Expenditure seen from the web Directorate General of Financial Balance. The method used in this research is quantitative descriptive method with co-relational approach and by using multiple linear regression test analysis. The research population is the Regencies and Cities in West Java period 2012-2015 with a sample of 10 regencies and cities in West Java with span of 4 years, so that obtained 40 observations. Research objectives are economic growth, local revenue, and gross regional domestic product (GRDP) as independent variable and capital expenditure as dependent variable. Based on the results of partial research, economic growth has no effect on capital expenditure, local revenue has no effect on capital expenditure, and gross regional domestic product (PDRB) has an effect on capital expenditure. However, simultaneously economic growth, local revenue, and gross regional domestic product (GRDP) have an effect on capital expenditure.

Keywords: Economic Growth, Local Revenue, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Capital Expenditure

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dalam penelitian ini, Data Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto di akses melalui website BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan Belanja Modal dilihat dari web direktorat jendral perimbangan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional dan dengan menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2015 dengan sampel sebanyak 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan rentang waktu 4 tahun, sehingga diperoleh 40 observasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh terhadap belanja modal. Namun secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Amanat dari pembukuan UUD 1945 adalah terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, yang diwujudkan dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hal ini berarti dengan adanya proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan yang adil dan merata (Nurgraeni,2011:96).

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri

dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Didalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Dijelaskan pula bahwa suatu daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan dan kemampuan daerah.

Hariato dan Adi (2007:2) mengutarakan, dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya (Kuncoro,2014:37).

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya penyerapan anggaran belanja modal tersebut adalah jeleknya infrastruktur yang sudah ada dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru. belum terbangunnya infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan pengolahan air bersih menyebabkan para investor swasta baik swasta nasional maupun asing enggan berinvestasi di daerah tersebut selamanya akan tergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian setiap daerah akan terus rendah, itu adalah sebagian besar akibat belanja rutin pemerintah.

Untuk membangun suatu daerah dibutuhkan belanja modal sesuai kebutuhan daerah akan sarana dan prasana baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Menurut Mardiasmo (2012:167) “akan lebih baik jika alokasi belanja modal daerah (pemda) di daerah lebih banyak digunakan untuk belanja modal yang berorientasi publik, sebab sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya kesenjangan fiskal yang dihadapi daerah”.

Diharapkan dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal maka akan menstimulasi perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif, yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah sehingga kapasitas fiskal dapat meningkat kembali dan kesenjangan fiskal dapat diminimalisir.

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal. Dari faktor yang mempengaruhi belanja modal tersebut ternyata ketersediaan sumber-sumber dana untuk membiayai belanja modal daerah memang sangat berperan penting dalam anggaran APBD untuk pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sumber pendapatan PAD di kas pemda berdampak pada pengoptimalan alokasi belanja modal di daerah tersebut.

Halim (2004:10) mengemukakan bahwa :

Sumber pendapatan daerah berupa Pad dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melalui pajak daerah, sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal. Kontribusi pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan belanja modal.

Untuk mencapai tingkat kemakmuran suatu negara dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Sukirno (1996:33) mengemukakan yang dimaksud dengan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan peningkatan produk domestik regional bruto dari masyarakat di suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, fenomena-fenomena yang bersumber dari data lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
3. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
4. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

B. Tinjauan Pustaka

Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Mecking (1976) dalam Syarifudin (2014:30) teori keagenan dapat di definisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) untuk membuat keputusan yang terbaik untuk prinsipal.

Keuangan Publik

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara (publik). Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah, pemda harus mengacu dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara yang ada di atasnya, (Mahfud dan Sholihin 2015:4).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dinilai oleh uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahrudin (2012:76) mengatakan bahwa untuk mengukur penyelenggaraan pemerintah yang *good governace* maka pemerintah harus mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Transparansi
2. Efisienai
3. Efektif
4. Akuntabilitas
5. Partisipatif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Fungsi APBD merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2006: 9) mengemukakan bahwa, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2009:44).

Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Firmansyah (2009:81), Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu :

1. Kekayaan Alam
2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Alam
3. Investasi (penanaman Modal)
4. Sistem dan Sikap Sosial
5. Teknologi
6. Efisiensi

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

1. Pendapatan Nasional
2. Pendapatan Perkapita
3. Tenaga Kerja dan Pengangguran
4. Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan asli Daerah (PAD)

Menurut Rosidin (2015:397) “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber”.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS, 2008:5)

Metode Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Metode penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi
2. Pendekatan Pendapatan
3. Pendekatan Pengeluaran

Belanja Modal

Belanja Modal menurut Mahmudi (2010:96) sebagai berikut: “Belanja modal yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software dan sebagainya”.

Indikator Belanja Modal

Menurut SAP (Dalam Evaluasi Belanja Modal 2013:11-12), belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu :

1. Belanja Modal Tahan
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui posisi penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka pemikiran berawal dari sebuah masalah, masalah ialah suatu penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Menurut Sugiyono (2009:52) masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erdi dan Rachmawati (2015) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini tidak mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bambang dan Supriyatno (2015), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian lain yang Yeni, dwi dan Resti (2012), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Namun kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengolah potensi lokal dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya berbeda.

Perbedaan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya (Putro, 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devi, indiyani (2014), bahwa Produk Domestik Regional Bruto Berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

C. METODE PENELITIAN

Objek dan Metode Penelitian

Objek Penelitian

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat). Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknis analisis data kuantitatif karena data yang di dapat dari unsur APBD yang berupa angka. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau tidak.

Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto. Variabel dependen yang digunakan adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Definisi Variabel Penelitian

Variabel Independen

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Produk domestik Regional Bruto (PDRB)

Variabel Dependen

1. Belanja Modal

Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari sumber yang sudah ada yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diperoleh dari Departemen keuangan dan data Produk Domestik regional Bruto yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi berupa pengambilan data melalui dokumen elektronik dimana data tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja pada periode 2012-2015 yang diperoleh melalui akses *website* Departemen Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id. Data produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bisa di akses di *website* BPS Kota/Kabupaten yang bersangkutan dan dari jurnal-jurnal atau hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Populasi dan Sampel

Populasi

27 ab/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Sampel

10 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

Rancangan Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Heteroskedastisitas
4. Uji Autokorelasi

Pembahasan

Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) terhadap Belanja Modal (Y)

Pembahasan Variabel pertumbuhan Ekonomi secara Parsial, yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki t hitung sebesar 0,941. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,02809 ($0,941 < 2,02809$) dengan signifikansi $0,353 > 0,05$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal diterima. Dimana tabel *coefficients* menunjukkan bahwa nilai signifikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,353.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y)

Pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial yaitu, Variabel pendapatan asli daerah memiliki t hitung sebesar 0,426. Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,02809 ($0,426 < 2,02809$) dengan signifikansi $0,673 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal ditolak.

Pengaruh Produk Domestik Bruto (X_3) terhadap Belanja Modal (Y)

Pembahasan Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengenai pengaruh PDRB terhadap Belanja Modal secara parsial yaitu, Variabel produk domestik regional bruto memiliki t hitung sebesar 3,585, Sedangkan t_{tabel} sebesar 2,02809 ($3,585 > 2,02809$) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan dari produk domestik regional bruto terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal diterima.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi empiris pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat) pada periode tahun 2012-2015, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (studi empiris pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat) pada periode tahun 2012-2015
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (studi empiris pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat) pada periode tahun 2012-2015
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Belanja Modal (studi empiris pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat) pada periode tahun 2012-2015

4. Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal (Y).

E. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang akan disampaikan, diantaranya:

Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:

1. Menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru dan lebih panjang. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar memberikan gambar yang luas dan terkini mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal.
2. Menambah variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi belanja modal.
3. Menambah jumlah sampel dalam penelitian agar hasil yang didapatkan lebih baik.

Saran Praktis

Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat :

1. Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal).
2. Meningkatkan sumber-sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada, misal dengan penyuluhan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak.
3. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan upaya sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi. Pemerintah daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan begitu diharapkan pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adi, Priyo Hari dan Hariyanto, David. (2007). *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Yani. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Ibrahim Hasyim, (2016). *Makro Ekonomi. Edisi Pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ari Kunto, Susasimi. (2001). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asyifa Murni, (2016). *Ekonomi Makro. Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2010). *PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 2010-2012*. Bandung.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Chabib Soleh dan Heru Rosmansyah. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- Dadang, Solihin. MA. (2006). *Modul Pusklat Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Djaenuri, Aries. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, ML (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Juliandi, Azwar dan Irfan. (2014). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu bisnis*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Kuncoro, Mudrajat. (2007). *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi Perencanaan, Strategis dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII press.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masyuhuri dan Zaenuddin. (2008). *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugraeni. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Akmenika UPY, Vol. 8.
- Saca Firmansyah. (2009). *Partisipasi Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sugijanto. (1995). *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non Laba*. Malang: PPA FE UB.
- Sugiono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.
- Suparmoko. (2000). *Keuangan Negara : Teori dan Praktek*. BPFE-Yogyakarta.
- Tambunan. (2009). *UMKM Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia.
- Uma. Sekaran. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang :

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Undang-undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Website :

<http://eprints.undip.ac.id/38749/1/EKO.pdf> jurnal pertumbuhan ekonomi

<http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4486>

<http://www.akuntansilengkap.com/ekonomi/pertumbuhan-ekonomi-pengertian-indikator-serta-cara-mengukur/> <http://fia-ub.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-keuangan-dan-manajemen-publik.html>

<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadeta/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf>

<http://www.djpk.depkeu.go.id/>

<http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi.html>

<http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/indikator-pertumbuhan-ekonomi.html>

<http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1046>

<https://jabar.bps.go.id/>

<https://panetir.wordpress.com/2012/12/30/pengaruh-dana-alokasi-umum-dau-dan-pendapatan-asli-daerah-pad-terhadap-prediksi-belanja-modal-studi-empiris-pada-pemerintahan-kabupatenkota-di-provinsi-aceh-bab-3/>